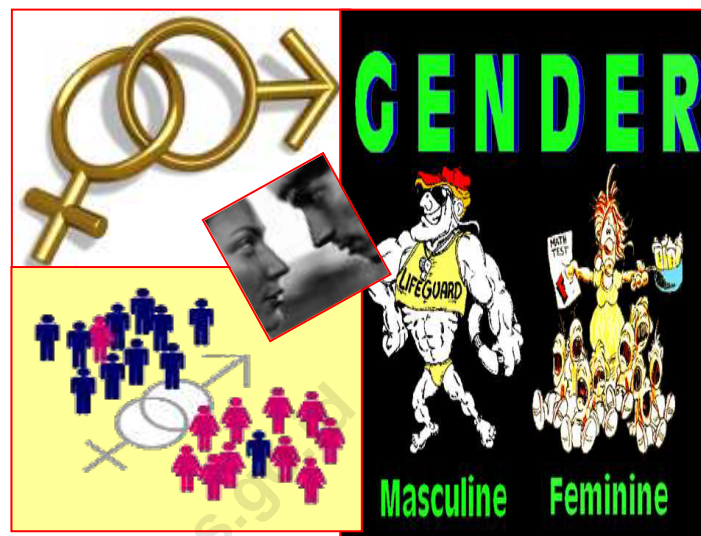
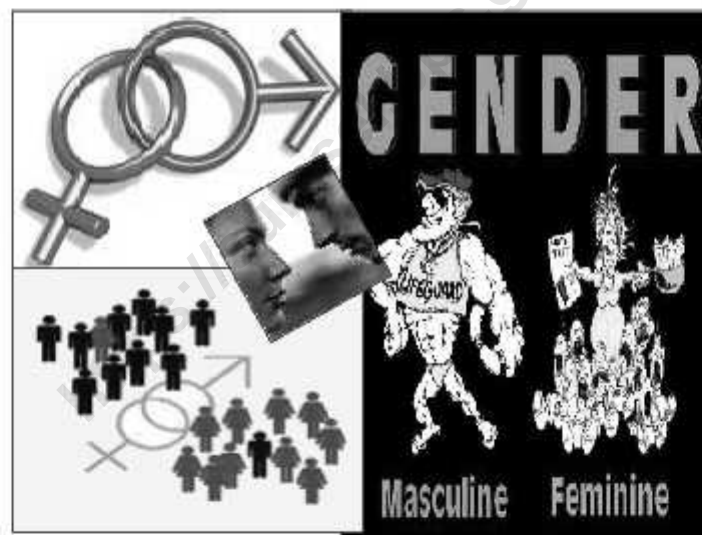


STATISTIK GENDER PROVINSI SUMATERA SELATAN 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

STATISTIK GENDER
PROVINSI SUMATERA SELATAN
2016



STATISTIK GENDER PROVINSI SUMATERA SELATAN 2016

ISSN : 2503-409X
No. Publikasi : 16523.1704
Katalog : 2104012.16

Ukuran Buku : 17,5cm x 25cm
Jumlah Halaman : viii + 49 Halaman

Naskah : Statistik Sosial

Gambar Kulit : Statistik Sosial

Penyunting : Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh : ©BPS Provinsi Sumatera Selatan

Dicetak Oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi dengan judul "Statistik Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016" ini merupakan publikasi rutin yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen mengenai statistik gender. Data yang digunakan dalam publikasi ini umumnya mengacu kepada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2016.

Harapan kami publikasi ini sangat bermanfaat bagi para pengguna data statistik, baik dari pemerintah, swasta maupun kalangan akademisi. Publikasi ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran sangat diperlukan demi penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung sampai terbitnya publikasi ini kami sampaikan terima kasih.

Palembang, September 2017

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPALA,



Yos Rusdiansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
I. PENDAHULUAN	1
II. KEPENDUDUKAN	3
2.1 Jumlah Penduduk	3
2.2 Struktur Umur Penduduk	5
2.3 Status Perkawinan	7
III. PENDIDIKAN	11
3.1 Angka Buta Huruf	12
3.2 Rata-rata Lama Sekolah	14
3.3 Tingkat Pendidikan	15
3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah	17
IV. KETENAGAKERJAAN	19
4.1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	19
4.2 Lapangan Pekerjaan	23
4.3 Status Pekerjaan	26
4.4 Pengangguran Terbuka	27
4.5 Pengangguran Terdidik	31
4.6 Setengah Pengangguran	33
V. KESEHATAN	37
5.1 Angka Kematian Bayi	37
5.2 Angka Keluhan Sakit	39
5.3 Angka Kesakitan	40
5.4 Penolong Persalinan	40
VI. FERTILITAS DAN KB	43
6.1 Umur Perkawinan Pertama	44
6.2 Partisipasi KB	45
VII. PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Halaman

II. KEPENDUDUKAN

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2016	4
Tabel 2.2.	Seks Rasio Usia Ketergantungan (produktif dan inproduktif secara ekonomi) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Tahun 2016	6
Tabel 2.3.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/ Kota, Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2016	8
Tabel 2.4.	Keadaan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Menurut Jenis Kelamin	9

III. PENDIDIKAN

Tabel 3.1.	Angka Buta Huruf Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016	12
Tabel 3.2.	Angka Buta Huruf Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2016	14
Tabel 3.3.	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Prov. Sumatera Selatan Tahun 2013-2016	15
Tabel 3.4.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016	16
Tabel 3.5.	Keadaan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Menurut Jenis Kelamin	18

IV. KETENAGAKERJAAN

Tabel 4.1.	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan 2013-2016	20
Tabel 4.2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Sumatera Selatan	21
Tabel 4.3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016	22
Tabel 4.4.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2016	25

Tabel 4.5.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016	26
Tabel 4.6.	Jumlah Penduduk yang Menganggur Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Sumatera Selatan Tahun 2013-2016	28
Tabel 4.7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Sumatera Selatan Tahun 2013-2016	29
Tabel 4.8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016	31
Tabel 4.9.	Tingkat Pengangguran Terdidik Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016	32
Tabel 4.10.	Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Sumatera Selatan Tahun 2016	34
Tabel 4.11.	Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016	35
Tabel 4.12.	Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Menurut Jenis Kelamin	36

V. KESEHATAN

Tabel 5.1.	Keadaan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Menurut Jenis Kelamin	42
------------	------------------------------------------------------------------------------	----

VI. FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

Tabel 6.1.	Beberapa Indikator Fertilitas Di Sumatera Selatan (Beberapa Tahun)	44
Tabel 6.2.	Keadaan Fertilitas dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
III. PENDIDIKAN	
Gambar 3.1. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	16
Gambar 3.2. APS Menurut Jenis Kelamin Di Sumatera Selatan Tahun 2016	17
IV. KETENAGAKERJAAN	
Gambar 4.1. Persentase Penduduk Perempuan yang Bekerja Menurut Sektor Usaha	24
Gambar 4.2. Persentase Penduduk Perempuan 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2016	27
Gambar 4.3. Tingkat Pengangguran Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kota-Desa Tahun 2016	30
V. KESEHATAN	
Gambar 5.1. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Tahun 2016	41
VI. FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA	
Gambar 6.1. Persentase Wanita Menurut Perkawinan Pertama	45

PENDAHULUAN

Secara kodrat, perempuan dan laki-laki dilahirkan dengan sejumlah perbedaan. Perempuan memiliki karakteristik, hak dan kewajiban yang unik sesuai dengan kodratnya yang memiliki kelemahan sekaligus kekuatan sebagai makhluk feminin. Sebagai insan feminin, kemampuan perempuan tidak dapat diragukan lagi, misalnya dalam membentuk keluarga sejahtera, mendidik anak-anak dan remaja, serta mendampingi suami dalam membina karir.

Namun demikian, tugas-tugas perempuan tidak hanya terbatas pada urusan domestik (rumah tangga) seperti yang dipahami sebagian masyarakat selama ini. Dari segi gender, kaum perempuan pada dasarnya sama dengan kaum laki-laki, mempunyai hak dan kewajiban yang sama peranannya di dalam masyarakat, tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan. Perempuan, sebagaimana halnya laki-laki, merupakan sumber daya bagi pembangunan. Oleh karena itu keterlibatan peran perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan perlu untuk ditingkatkan lagi.

Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berperan dalam berbagai bidang kegiatan pembangunan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kesempatan sama yang dimaksud misalnya pendidikan, pekerjaan yang layak, pendapatan yang sesuai dengan kemampuannya dan sebagainya. Pandangan maupun perlakuan diskriminasi gender (perbedaan kesempatan dan perlakuan yang terjadi dalam suatu sistem karena adanya perbedaan jenis kelamin) perlu dihilangkan.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan sebenarnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Dari catatan BPS diketahui bahwa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja makin meningkat. Bahkan laju pertumbuhan angkatan kerja perempuan lebih cepat daripada laju pertumbuhan angkatan kerja laki-laki. Demikian juga jika dilihat dari sisi pendidikan, dimana partisipasi sekolah kaum

perempuan dari tahun ke tahun terus meningkat. Selain itu, Tingkat pendidikan angkatan kerja perempuan juga mengalami peningkatan.

Untuk mengetahui seberapa besar peranan perempuan dalam pembangunan dewasa ini serta seberapa jauh posisi kaum perempuan dibandingkan kaum laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan diperlukan gambaran yang lebih rinci mengenai statistik yang berwawasan gender (statistik yang dirinci menurut jenis kelamin) dari sisi kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan maupun kesehatan. Gambaran ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang peningkatan peran perempuan. Serta dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, publikasi ini berusaha menyajikan statistik yang berwawasan gender. Sumber data utama publikasi ini berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016. Untuk memperkaya data dan mempertajam analisisnya digunakan juga data lainnya yang bersumber dari data Survei Penduduk 2010, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015, Proyeksi Penduduk 2016 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2016.

KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika kualitas penduduknya rendah. Oleh karena itu agar penduduk menjadi potensi bukan menjadi beban dalam pembangunan, maka pemerintah harus melakukan upaya pengendalian jumlah penduduk dan mendorong peningkatan kualitas penduduk. Di samping itu harus melakukan upaya-upaya yang mendorong pada peningkatan kesejahteraan penduduk dengan melakukan skala prioritas perencanaan dan intervensi program pembangunan sosial di segala bidang.

2.1. Jumlah Penduduk

Menurut hasil proyeksi jumlah penduduk Sumatera Selatan tahun 2016 mencapai 8.160.901 jiwa, meningkat sekitar 108.586 jiwa dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 8.052.315 jiwa. Dengan demikian tingkat pertumbuhan penduduk Sumatera Selatan dalam setahun terakhir adalah 1,35 persen.

Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar bagi pembangunan bila didukung oleh kualitas penduduk yang memadai baik dari segi pendidikan, keahlian maupun keterampilan. Sebaliknya penduduk akan menjadi beban pembangunan bila tidak didukung oleh pendidikan, keahlian dan keterampilan yang cukup. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang serius terhadap masalah-masalah kependudukan.

Tabel 2.1 menunjukkan komposisi penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 menurut jenis kelamin. Tampak di sini secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan, yaitu 4.147.140 jiwa untuk penduduk laki-laki dan 4.013.761 jiwa untuk penduduk perempuan.

Perbedaan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan akan lebih jelas tergambar melalui indikator kependudukan yang disebut rasio jenis kelamin atau seks rasio. Seks rasio menggambarkan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa seks rasio penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 sebesar 103,32 artinya terdapat 103 orang penduduk laki-laki per 100 orang penduduk perempuan.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin, Tahun 2016

No	Kabupaten/kota	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
1	2	3	4	5	6
1	OKU	181.108	173.380	354.488	104.46
2	OKI	408.282	390.200	798.482	104.63
3	Muara Enim	310.098	299.509	609.607	103.54
4	Lahat	202.796	194.628	397.424	104.20
5	Musi Rawas	199.108	190.131	389.239	104.72
6	Musi Banyuasin	317.725	303.013	620.738	104.86
7	Banyuasin	419.567	403.008	822.575	104.11
8	Oku Selatan	182.924	165.650	348.574	110.43
9	Oku Timur	335.283	321.285	656.568	104.36
10	Ogan Ilir	207.798	206.706	414.504	100.53
11	Empat Lawang	123.133	118.203	241.336	104.17
12	PALI	91.592	90.627	182.219	101.06
13	Muratara	93.325	91.990	185.315	101.45
14	Palembang	802.990	799.081	1.602.071	100.49
15	Prabumulih	90.403	89.160	179.563	101.39
16	Pagaralam	69.304	66.024	135.328	104.97
17	Lubuk Linggau	111.704	111.166	222.870	100.48
	Sumatera Selatan	4.147.140	4.013.761	8.160.901	103,32

Sumber :BPS, Proyeksi Penduduk 2016

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, terlihat bahwa semua kabupaten/kota seks rasio penduduknya mencapai 100 persen dan lebih. Artinya jika dilihat menurut jenis kelamin maka secara keseluruhan komposisi penduduk di semua kabupaten/kota lebih banyak penduduk laki-lakinya dibandingkan perempuan.

Tetapi indikator tersebut akan lebih tajam menggambarkan permasalahan jika seks rasio dilihat menurut kelompok umur.

Untuk melihat komposisi penduduk menurut umur, biasanya BPS menggunakan tiga kategori kelompok umur, yaitu kelompok umur 0-14 tahun yang mencerminkan penduduk usia muda, kemudian kelompok umur 15-64 tahun yaitu kelompok usia kerja atau usia produktif dan kelompok usia lanjut atau 65 tahun ke atas. Hasil proyeksi penduduk tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan pada kelompok umur muda (0-14) dan kelompok usia 15-64 lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan, hal ini tercermin dari seks rasio sebesar 104,79 pada kelompok umur muda dan seks rasio sebesar 103,82 pada kelompok umur produktif. Sedangkan yang berada pada kelompok usia 65 tahun keatas seks rasio nya sangat jauh dibawah seratus, yaitu hanya 87,47. Sehingga jelas bahwa pada kelompok lansia, penduduk perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki.

2.2. Struktur Umur Penduduk

Dilihat dari distribusi umur, persentase penduduk yang berada di kelompok umur 0-14 tahun masih cukup besar untuk kedua jenis kelamin. Ini berarti bahwa penduduk Sumatera Selatan tergolong masih relatif muda. Namun demikian telah terjadi perubahan struktur umur penduduk ke arah struktur umur yang lebih tua.

Seks Rasio rentang Umur ketergantungan merupakan perbandingan antara laki-laki dan perempuan jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas (usia tidak produktif) dengan jumlah penduduk berusia 15-64 tahun (usia produktif). Seks rasio usia ketergantungan (produktif dan tidak produktif) menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Seks Rasio Usia Ketergantungan (Produktif Dan Inproduktif Secara Ekonomi) Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin, Tahun 2016

No	Kabupaten /Kota	Seks Rasio Usia Ketergantungan		
		Produktif (15-64)	In Produktif	
			0-14	65+
1	2	3	4	5
1	OKU	105.55	104.17	90.06
2	OKI	105.33	104.26	96.64
3	Muara Enim	104.48	105.64	77.61
4	Lahat	106.00	104.59	82.16
5	Musi Rawas	104.96	104.49	102.80
6	Musi Banyuasin	105.58	104.11	98.47
7	Banyuasin	103.99	104.45	103.58
8	Oku Selatan	114.47	103.17	98.09
9	Oku Timur	104.98	104.64	96.22
10	Ogan Ilir	101.15	105.11	69.96
11	Empat Lawang	107.34	102.23	78.00
12	PALI	100.61	105.67	73.78
13	Muratara	101.74	104.80	73.46
14	Palembang	99.80	106.32	78.75
15	Prabumulih	101.00	105.82	77.69
16	Pagaralam	107.49	103.66	82.67
17	Lubuk Linggau	99.96	103.65	86.51
Sumatera Selatan		103,81	103,82	104.79

Sumber : BPS, Hasil Proyeksi Penduduk 2016

Seks Rasio Usia ketergantungan Produktif (usia 15-64) tahun 2016 sebesar 103,82 dan seks rasio penduduk usia tidak produktif secara ekonomi 0-14 sebesar 104,79 dan 65+ sebesar 87,47. Artinya secara umum di Sumatera Selatan baik usia produktif maupun tidak produktif untuk rentang muda (0-14) lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Dan Secara signifikan berbalik lebih banyak perempuan dari pada laki-laki di rentang usia tua (usia 65 ke atas) hampir untuk semua kabupaten/kota terjadi hal yang sama untuk seks rasio usia tua berkisar di bawah 100 (73-98) kecuali Kabupaten Banyuasin dan Musi Rawas yang

seks rasio tetap di atas 100. Untuk Sumsel seks rasio 65+ sebesar 85,22 yang artinya terdapat 85 orang penduduk laki-laki usia 65+ per 100 orang penduduk perempuan 65+. Ini menunjukkan perempuan lebih banyak mencapai usia 65 ke atas dibanding laki-laki hampir merata di seluruh kabupaten /kota.

Tabel 2.2 menunjukkan Seks Rasio Usia Ketergantungan (produktif dan inproduktif secara ekonomi) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2016. Menarik dibahas di seks rasio rentang usia produktif, pada umumnya semua kabupaten /kota di Sumsel berkisar di atas 100 kecuali Palembang dan Lubuk Linggau. Tertinggi di OKU Selatan mencapai 114,47 yang artinya terdapat 114 orang penduduk laki-laki usia 15-64 per 100 orang penduduk perempuan usia 15-64, tetapi di Palembang dan Lubuk Linggau justru laki-laki produktif lebih sedikit dibanding perempuan.

2.3. Status Perkawinan

Persentase penduduk laki-laki yang belum kawin lebih besar dibandingkan persentase penduduk perempuan yang belum kawin, yaitu sebesar 38,94 persen untuk penduduk laki-laki dan 29,66 persen untuk perempuan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa laki-laki cenderung lebih lama berstatus membujang dibandingkan perempuan. Artinya perempuan secara rata-rata kawin lebih muda dibandingkan laki-laki. Keadaan ini utamanya dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat.

Sebaliknya, persentase penduduk perempuan yang berstatus cerai baik cerai hidup dan cerai mati lebih besar daripada penduduk laki-laki dengan status yang sama. Ini berarti bahwa perempuan lebih tahan hidup menjanda dibandingkan laki-laki baik karena perceraian atau karena kematian pasangannya. Kedua fenomena di atas dijumpai juga pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.3. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, Tahun 2016

Kabupaten	Laki-laki					Perempuan				
	Status Perkawinan				Jumlah	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati		Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(01) Ogan Komering Ulu	38,84	58,43	1,12	1,61	100,00	29,64	61,77	1,35	7,25	100,00
(02) Ogan Komering Ilir	37,05	59,91	0,52	2,52	100,00	27,09	62,74	2,01	8,16	100,00
(03) Muara Enim	38,63	58,03	1,07	2,28	100,00	28,50	60,11	1,65	9,75	100,00
(04) Lahat	39,54	56,71	0,72	3,03	100,00	26,79	58,92	4,11	10,17	100,00
(05) Musi Rawas	33,55	64,29	0,51	1,65	100,00	23,66	67,40	2,12	6,81	100,00
(06) Musi Banyuasin	39,65	57,88	0,89	1,58	100,00	30,21	60,90	1,57	7,31	100,00
(07) Banyuasin	38,63	58,42	0,75	2,20	100,00	29,98	61,86	1,20	6,96	100,00
(08) OKU Selatan	35,93	60,48	1,45	2,13	100,00	23,56	67,58	0,98	7,88	100,00
(09) OKU Timur	33,80	63,67	0,53	2,00	100,00	24,06	66,21	1,05	8,69	100,00
(10) Ogan Ilir	39,96	58,05	0,34	1,65	100,00	30,36	58,23	1,62	9,80	100,00
(11) Empat Lawang	36,87	58,47	2,72	1,94	100,00	26,58	61,55	1,81	10,06	100,00
(12) Pali	41,61	56,90	0,99	0,51	100,00	32,45	56,11	1,68	9,76	100,00
(13) Musi Rawas Utara	40,60	56,37	1,37	1,65	100,00	31,45	56,32	2,29	9,95	100,00
(71) Palembang	43,47	53,91	0,46	2,15	100,00	36,06	53,93	2,22	7,80	100,00
(72) Prabumulih	38,10	59,46	0,24	2,19	100,00	28,85	59,19	2,56	9,41	100,00
(73) Pagaram	39,14	58,06	1,30	1,50	100,00	27,42	61,69	2,46	8,43	100,00
(74) Lubuklinggau	39,70	57,50	0,74	2,07	100,00	32,72	57,16	2,34	7,78	100,00
Sumatera Selatan	38,94	58,23	0,78	2,05	100,00	29,66	60,18	1,87	8,29	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2016

Berikut ini dapat dilihat beberapa tabel yang berhubungan dengan indikator kependudukan yang telah dibedakan berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.4. Keadaan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Menurut Jenis Kelamin

Uraian	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Jumlah Penduduk (000) Total	4.147.140	4.013.761	8.160.901
2 Kelompok Umur (%)			
0-14 tahun	29,28	29,06	29,17
15-64 tahun	66,80	66,33	66,57
65+ tahun	3,92	4,60	4,26
3 Seks Rasio			103,32
4 Status Perkawinan (%)			
Belum Kawin	38,94	29,66	34,37
Kawin	58,23	60,18	59,19
Cerai Hidup	0,78	1,87	1,32
Cerai Mati	2,05	8,29	5,12

Sumber: BPS (Hasil Proyeksi Penduduk 2016, Susenas 2016)

<https://sumsel.bps.go.id>

PENDIDIKAN

P

endidikan dapat menyebabkan meningkatnya partisipasi dalam angkatan kerja sehingga pendapatan meningkat dan akhirnya mengurangi derajat kemiskinan absolut.

Pendidikan juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Singkatnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dibarengi oleh pemerataan pendapatan.

Mengingat pentingnya pendidikan dalam pembangunan ekonomi, diperlukan usaha-usaha yang dilakukan secara terus menerus untuk mengembangkan pendidikan bagi masyarakat baik dari segi kualitas maupun pemerataan pendidikan. Pendidikan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan daerah, suku, agama maupun jenis kelamin. Masyarakat juga perlu terus di dorong untuk meningkatkan partisipasinya dalam pendidikan.

Beberapa indikator pendidikan perempuan di Sumatera Selatan menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dilihat dari pencapaian pendidikan (*education attainment*), dari 28,44 persen di 2015 menjadi 29,98 persen pada tahun 2016 dari seluruh penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas mempunyai pendidikan minimal SLTA. Persentase ini masih lebih kecil jika dibandingkan laki-laki yaitu sebesar 33,15 persen.

Hingga saat ini dirasakan masih adanya kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain disebabkan masih adanya kecenderungan masyarakat terutama di daerah pedesaan yang memprioritaskan pendidikan bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Demikian juga masih adanya pandangan yang keliru pada sebagian

masyarakat bahwa perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya akan mengurus rumahtangga.

Padahal peranan perempuan sangatlah besar tidak hanya dalam pembinaan keluarga yang pada akhirnya akan menentukan kualitas generasi masa depan, tetapi juga dalam peran sosial di masyarakat. Karenanya perempuan dituntut untuk mempunyai pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang luas untuk mendukung tugas-tugasnya baik sebagai pendidik bagi anak-anaknya maupun dalam peran sosialnya di masyarakat.

3.1. Angka Buta Huruf

Kemampuan membaca dan menulis (baca tulis) merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat menuju hidup sejahtera. Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf. Persentase melek huruf (*literacy rate*) didefinisikan sebagai besarnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis. Persentase melek huruf ini juga menggambarkan mutu sumber daya manusia karena dengan kemampuan membaca dan menulis seseorang dapat berkomunikasi dan menerima informasi dengan baik.

Berikut ini dapat dilihat angka buta huruf menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Angka Buta Huruf Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2016

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4
15-24	0,16	0,05	0,10
15-44	0,23	0,48	0,35
45+	1,55	6,81	4,18
15+	0,63	2,47	1,54

Sumber : BPS (Susenas 2016)

Persentase melek huruf penduduk 15+ Sumatera Selatan tahun 2016 mencapai 98,46 persen. Dengan kata lain penduduk yang masih buta huruf (tidak bisa membaca dan menulis) tinggal sebesar 1,54 persen.

Dari sisi perbedaan jenis kelamin, penduduk perempuan yang buta huruf di Sumatera Selatan masih lebih besar dibandingkan laki-laki yang buta huruf. Dari setiap 100 orang perempuan yang berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2016 terdapat rata-rata 2 orang yang masih buta huruf, sedangkan dari 100 orang laki-laki usia 15 tahun ke atas hanya sekitar 1 orang yang masih buta huruf pada tahun 2016.

Angka buta huruf akan lebih bermakna apabila dilihat menurut kelompok umur. Hal ini disebabkan adanya perbedaan yang sangat signifikan dalam kesempatan untuk belajar baca tulis. Hal ini dapat dilihat dari angka-angka yang disajikan pada Tabel 3.1, di mana nampak pola yang sangat berbeda pada masing-masing kelompok umur. Tampak jelas bahwa angka buta huruf yang tertinggi terdapat pada kelompok umur 45 tahun ke atas, terutama pada penduduk perempuan. Perbedaan antara persentase laki-laki dan perempuan yang buta huruf sangat signifikan yaitu masing-masing 1,55 persen dan 6,81 persen.

Pada kelompok umur muda (15-24 tahun), angka buta huruf laki-laki sedikit lebih tinggi daripada angka buta huruf perempuan yaitu 0,16 persen berbanding 0,05 persen. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingginya angka buta huruf baik laki-laki maupun perempuan lebih disebabkan karena peninggalan generasi terdahulu yang memang pada masanya sulit mendapat kesempatan untuk belajar.

Jika dibedakan menurut kabupaten/kota, terlihat dari Tabel 3.2 bahwa angka buta huruf tertinggi untuk penduduk usia 15 tahun ke atas adalah Kabupaten Banyuasin (2,97%), dan terendah di Kota Palembang (0,79%). Jika dilihat menurut jenis kelamin, laki-laki yang buta huruf di OKI paling besar

dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain. Buta huruf perempuan terbesar ada di Banyuasin, diikuti oleh Musi Rawas Utara dan OKU Timur.

Tabel 3.2 Angka Buta Huruf Menurut usia 15 tahun ke atas Kabupaten /Kota dan Jenis Kelamin, Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4
1. OKU	0,57	1,90	1,23
2. OKI	1,42	3,13	2,26
3. Muara Enim	0,25	2,47	1,34
4. Lahat	0,55	2,53	1,52
5. Musi Rawas	0,74	3,29	1,98
6. Muba	0,13	2,05	1,06
7. Banyuasin	1,11	4,91	2,97
8. OKU Selatan	0,29	1,76	0,98
9. OKU Timur	1,16	3,30	2,20
10. Ogan Ilir	0,20	1,43	0,82
11. Empat Lawang	0,63	1,81	1,21
12. PALI	0,00	1,64	0,83
13. MURATARA	0,77	3,86	2,33
71. Palembang	0,33	1,24	0,79
72. Prabumulih	0,05	1,59	0,82
73. Pagaralam	0,53	2,55	1,51
74. Lubuklinggau	1,37	2,69	2,03
Sumatera Selatan	0,63	2,47	1,54

Sumber : BPS (Susenas 2016)

3.2. Rata - Rata Lama Sekolah

Indikator lainnya untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Di Sumatera Selatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2016 mencapai 8,32 tahun, dimana laki-laki 8,52 tahun dan perempuan 8,12 tahun. Hal ini

menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat pendidikan penduduk Sumatera Selatan baru sampai jenjang pendidikan kelas dua Sekolah Menengah Pertama.

Tabel 3.3. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2016

Jenis Kelamin	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Laki-laki	8,04	8,24	8,37	8,44	8,59	8,50	8,52
Perempuan	7,60	7,87	8,04	8,08	8,22	8,02	8,12
Total	7,82	8,06	8,21	8,27	8,41	8,26	8,32

Sumber : BPS, Susenas 2010-2016

3.3. Tingkat Pendidikan

Salah satu indikator pendidikan yang dapat digunakan untuk melihat kualitas pendidikan penduduk adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tabel 3.4 menunjukkan bahwa dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, nampak bahwa mayoritas penduduk Sumatera Selatan adalah tamatan SD/ sederajat yaitu sebesar 34,77 persen. Sedangkan yang tamat SLTP/ sederajat hanya sekitar 17,46 persen, dan tamat di atas SLTA/ sederajat sebesar 24,27 persen.

Persentase penduduk perempuan 15 tahun ke atas yang tidak pernah sekolah dan yang tidak tamat SD (18,04%) lebih tinggi daripada laki-laki (14,38%). Sama halnya dengan buta huruf, hal ini juga disebabkan karena peninggalan generasi tua yang memang sulit mendapat kesempatan belajar pada masa itu.

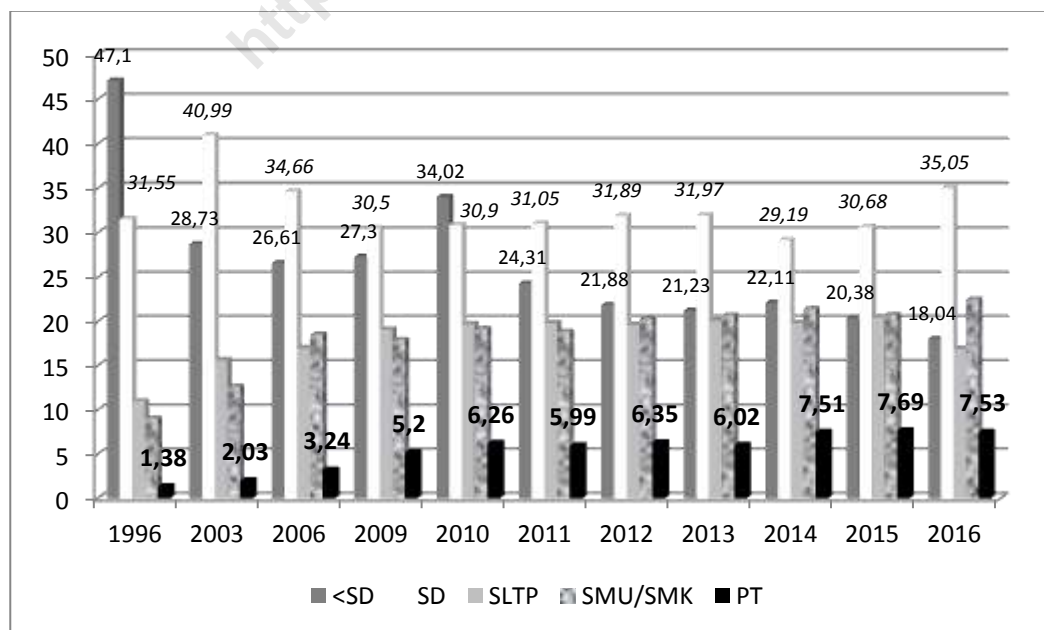
Tabel 3.4. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	L	P	L+P
1	2	3	4
Tidak punya ijazah SD	14,38	18,04	16,18
SD/Sederajat	34,50	35,05	34,77
SLTP/Sederajat	17,97	16,93	17,46
SLTA/Sederajat	26,05	22,45	24,27
Universitas	7,10	7,53	7,32
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2016

Meskipun demikian, dalam 20 tahun terakhir, peningkatan pendidikan perempuan terbilang cukup besar. Hal ini ditunjukkan dengan secara signifikan meningkatnya persentase penduduk perempuan yang tamat di Perguruan Tinggi (Gambar 3.1.), yaitu dari 1,38 persen pada tahun 1996 naik menjadi 7,53 persen pada tahun 2016.

Gambar 3.1. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan



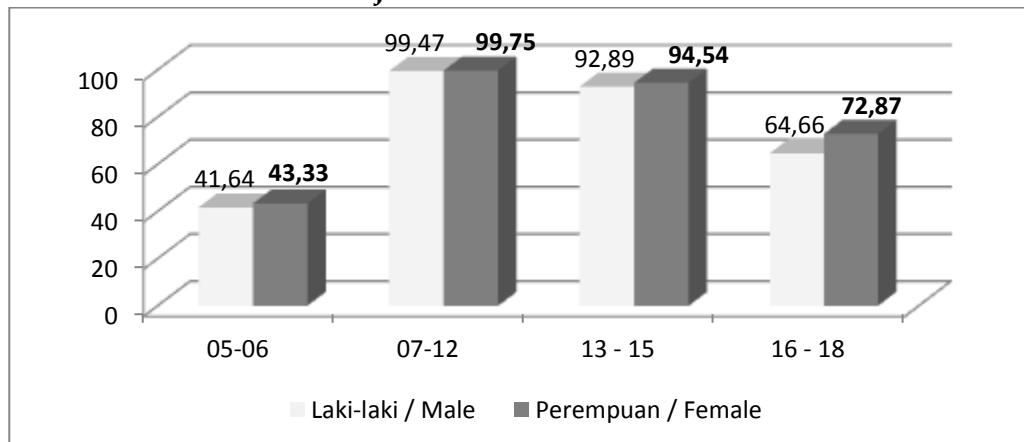
Sumber : Susenas 1996, 2003, 2006, 2009 - 2016

3.4. Tingkat Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia tertentu yang masih sekolah terhadap total jumlah penduduk usia tersebut. Dari Tabel 3.5 terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin menurun persentase murid yang bersekolah. Hal ini tercermin dari semakin menurunnya angka partisipasi sekolah (APS) pada kelompok umur 7-12, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

Umur 5 dan 6 sebenarnya belum usia sekolah formal melainkan masih umur prasekolah, hanya saja ternyata sudah banyak yang menyekolahkan anaknya ke Sekolah Dasar pada usia ini bahkan mencapai 40 persen lebih. Terlihat juga di tabel 3.5 bahwa pada kelompok umur 7-12 dan 13-15 APS Laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda tetapi pada umur 16-18 APS perempuan lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki. Hal ini tentu saja menarik untuk diteliti lebih lanjut mengapa pada anak-anak usia sekolah ketimpangan gender justru terjadi pada anak laki-laki di usia ini. Diduga hal ini disebabkan karena anak laki-laki lebih diharapkan untuk membantu mencari nafkah keluarga sehingga banyak yang tidak bersekolah lagi.

Gambar 3.2. APS Menurut Jenis Kelamin Di Sumatera Selatan Tahun 2016



Sumber : Susenas 2016

Satu hal yang dapat dipetik dari indikator ini adalah meskipun pendidikan gratis sudah diterapkan oleh pemerintah daerah tetapi kenyataannya pada anak-anak usia 13-15 tahun masih ada sekitar 6 persen lebih yang tidak bersekolah di SMP, pada usia 16-18 tahun SLTA, kurang dari sepertiganya tidak bersekolah di SLTA. Pembuat kebijakan harus meneliti lebih lanjut mengapa terjadi demikian.

Berikut ini dapat dilihat tabel yang berhubungan dengan indikator pendidikan yang telah dibedakan berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel.3. 5. Keadaan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016

Kondisi Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur			
5-6	41,64	43,33	42,45
7-12	99,47	99,75	99,61
13-15	92,89	94,54	93,68
16-18	64,66	72,87	68,67
2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan			
< SD	14,38	18,04	16,18
SD sederajat	34,50	35,05	34,77
SLTP sederajat	17,97	16,93	17,46
SMU sederajat	26,05	22,45	24,27
Akademi/ Universitas	7,10	7,53	7,32
3 Rata-rata Lama Sekolah	8,52	8,12	8,32
4 Angka Buta Huruf	0,63	2,47	1,54

Sumber : Susenas 2016

KETENAGAKERJAAN

D

alam membahas berbagai statistik yang berkaitan dengan gender, aspek ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting. Terdapat perilaku yang cukup berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam hal ketenagakerjaan seperti partisipasi dalam angkatan kerja, mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan, status pekerjaan maupun jenis pekerjaan. Perbedaan-perbedaan ini terkait dengan beberapa hal seperti pendidikan, kesempatan kerja yang ada serta faktor-faktor sosial budaya lainnya.

4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Secara praktis tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berusia 15 tahun atau lebih. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja adalah tenaga kerja yang aktif secara ekonomi baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

Situasi ketenagakerjaan di Sumatera Selatan selama setahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, dimana peningkatan jumlah penduduk diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja (tenaga kerja). Jumlah tenaga kerja pada tahun 2016 dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 meningkat sebanyak 96.143 orang. Adapun jumlah angkatan kerja selama setahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 244.007 orang.

Dilihat dari aspek gender selama periode 2015-2016, peningkatan jumlah tenaga kerja penduduk laki-laki sebesar 49.236 orang diikuti dengan peningkatan jumlah angkatan kerja laki-laki yaitu sebesar 77.943 orang.

Kenaikan tenaga kerja penduduk perempuan sebesar 46.907 orang diikuti dengan peningkatan angkatan kerjanya sebesar 166.064 orang. Hal ini menunjukkan indikasi adanya pergeseran aktivitas penduduk perempuan dari kegiatan yang tidak ekonomi aktif seperti sekolah atau mengurus rumah tangga ke kegiatan ekonomi aktif.

Tabel 4.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2016

Jenis Kelamin	2015	2016	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Tenaga Kerja</i>			
- Laki-laki	2.909.010	2.958.246	49.236
- Perempuan	2.832.298	2.879.205	46.907
- Total	5.741.308	5.837.451	96.143
<i>Angkatan Kerja</i>			
- Laki-laki	2.440.363	2.518.306	77.943
- Perempuan	1.494.424	1.660.488	166.064
- Total	3.934.787	4.178.794	244.007

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

TPAK penduduk Sumatera Selatan tahun 2016 sebesar 71,59 persen, lebih rendah dibandingkan TPAK pada tahun 2015 yaitu sebesar 68,53 persen. Penurunan angka TPAK tersebut mengindikasikan terjadinya pergeseran kecenderungan penduduk yang semula merupakan penduduk usia ekonomi aktif (angkatan kerja) menjadi penduduk usia ekonomi tidak aktif (bukan angkatan kerja).

Jika dicermati dari aspek gender, TPAK di Sumatera Selatan selama setahun terakhir terjadi kenaikan baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. TPAK penduduk laki-laki mengalami kenaikan sebesar 1,24 persen, sedangkan TPAK penduduk perempuan mengalami kenaikan sebesar 4,91 persen. Jika ditinjau lebih spesifik menurut daerah tempat tinggal, TPAK penduduk laki-laki di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 3,20

persen, sementara untuk daerah pedesaan mengalami kenaikan sebesar 0,13 persen. Untuk penduduk perempuan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan mengalami kenaikan angka TPAK yaitu untuk daerah perkotaan naik sebesar 4,97 persen dan untuk daerah pedesaan naik sebesar 4,87 persen.

Tabel 4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2016

Daerah/ Jenis Kelamin	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
- Laki-laki	79,72	82,92
- Perempuan	48,96	53,93
- Total	64,20	68,31
Pedesaan		
- Laki-laki	86,27	86,40
- Perempuan	55,10	59,97
- Total	71,10	73,54
Perkotaan+Pedesaan		
- Laki-laki	83,89	85,13
- Perempuan	52,76	57,67
- Total	68,53	71,59

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

TPAK penduduk laki-laki dari tahun ke tahun selalu cenderung lebih tinggi dibandingkan TPAK penduduk perempuan, hal ini terkait dengan budaya dan pandangan masyarakat yang masih menganggap bekerja dan mencari nafkah adalah kewajiban penduduk laki-laki, sedangkan perempuan hanya bertanggung jawab terhadap urusan domestik rumah tangga.

TPAK di daerah perkotaan baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan dari tahun ke tahun masih relatif lebih rendah dibandingkan daerah pedesaan. Hal ini tidak terlepas dari adanya perbedaan sifat pekerjaan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Struktur ekonomi pedesaan lebih

fleksibel karena lebih banyak usaha yang bersifat informal dan sebagian besar lapangan pekerjaan yang ada di pedesaan adalah sektor-sektor tradisional yang relatif kurang membutuhkan kualifikasi tertentu bagi tenaga kerja yang akan memasukinya. Selain itu, sifat dan aktifitas pekerjaan masih dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga, bahkan memungkinkan sekali kaum perempuan pedesaan bekerja sambil mengasuh anak. Berbeda dengan di daerah perkotaan yang sebagian besar jenis pekerjaannya lebih bersifat formal dan membutuhkan kualifikasi tertentu bagi tenaga kerja yang akan memasukinya.

Tabel 4.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ogan Komering Ulu	81,07	52,17	66,95
2. Ogan Komering Ilir	81,81	50,08	66,31
3. Muara Enim	87,68	55,86	71,97
4. Lahat	86,06	60,26	73,41
5. Musi Rawas	86,98	56,28	72,00
6. Musi Banyuasin	87,13	45,57	66,88
7. Banyuasin	84,93	47,88	66,77
8. OKU Selatan	89,41	64,35	77,68
9. OKU Timur	86,66	56,06	71,68
10. Ogan Ilir	86,80	60,58	73,60
11. Empat Lawang	83,09	62,00	72,80
12. P A L I	84,36	63,53	73,88
13. Musi Rawas Utara	84,66	46,15	65,40
71. Palembang	77,58	48,47	62,91
72. Prabumulih	83,31	58,17	70,71
73. Pagaram	88,26	66,52	77,69
74. Lubuklinggau	84,44	37,92	61,08
Sumatera Selatan	83,89	52,76	68,53
Sumatera Selatan (2016)	85,13	57,67	71,59

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Untuk data ketenagakerjaan, Sakernas tahun 2016 tidak dapat mengeluarkan level kab/kota karena alasan kecukupan sampel sehingga hanya hanya mereview tahun 2015. Pada Tabel 4.3, terlihat bahwa kabupaten/kota yang lebih dominan dengan karakteristik pedesaan mempunyai TPAK yang cenderung lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota yang didominasi oleh daerah perkotaan. Kabupaten OKU Selatan dan PALI sebagai contoh, mempunyai TPAK tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yaitu sebesar 77,68 persen dan 73,88 persen. Sedangkan Kota Lubuklinggau mempunyai angka TPAK terendah, yaitu sebesar 61,08 persen.

Ditinjau dari aspek gender menurut kabupaten/kota, TPAK penduduk laki-laki tertinggi di Kabupaten OKU Selatan yaitu sebesar 89,41 persen dan yang terendah Kota Palembang yaitu sebesar 77,58 persen. Sedangkan TPAK penduduk perempuan tertinggi di Kota Pagaralam yaitu sebesar 66,52 persen dan yang terendah di Kota Lubuklinggau sebesar 37,92 persen.

Data yang ditampilkan pada Tabel 4.3 memperkuat uraian sebelumnya bahwa baik secara absolut maupun dilihat dari aspek gender, kabupaten yang lebih dominan memiliki karakteristik pedesaan mempunyai TPAK yang cenderung lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota yang lebih dominan memiliki karakteristik perkotaan.

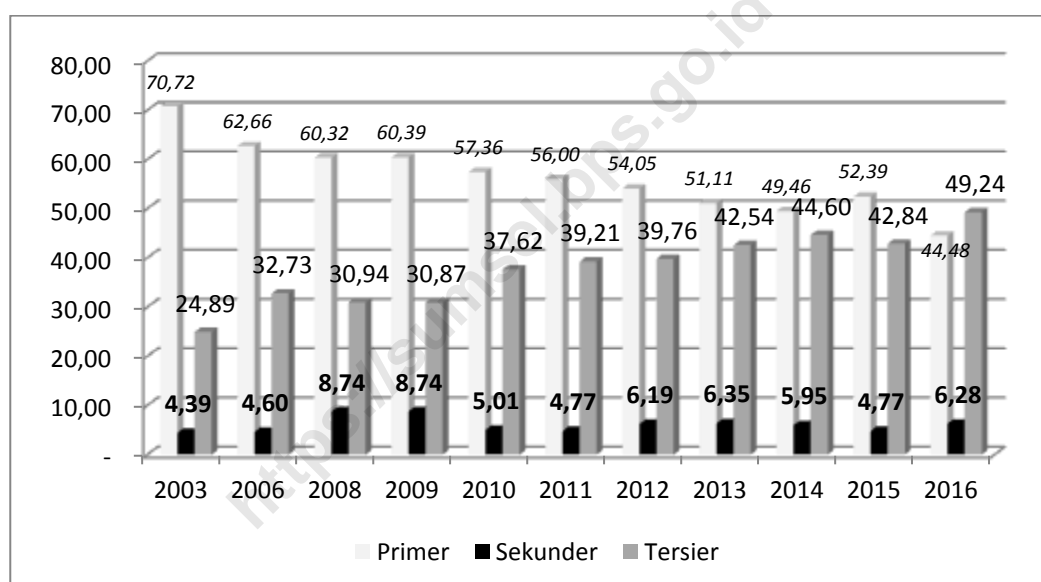
4.2. Lapangan Pekerjaan

Dilihat dari lapangan pekerjaan, 50 persen lebih penduduk Sumatera Selatan masih bekerja di sektor pertanian. Sektor lainnya yang cukup banyak digeluti penduduk adalah sektor perdagangan dan sektor jasa.

Perbedaan jenis kelamin ternyata mempengaruhi struktur lapangan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan khususnya di luar sektor pertanian. Sektor-sektor yang lebih banyak menyerap pekerja perempuan adalah sektor perdagangan dan sektor jasa. Persentase perempuan yang bekerja di sektor perdagangan sebesar 24,88 persen, di sektor jasa sebesar 22,87 persen dan

sektor industri sebesar 5,93 persen. Sedangkan sektor-sektor lainnya persentase pekerja laki-laki lebih besar terutama semua sektor primer, sektor transportasi dan sektor konstruksi. Struktur lapangan usaha perempuan yang bekerja tidak banyak mengalami perubahan selama 10 tahun terakhir tetapi tahun 2016 ini telah terjadi pergeseran mulai ke sektor tersier. Hanya saja, lapangan usaha pertanian tetap merupakan lapangan usaha yang mempunyai daya serap tenaga kerja perempuan paling besar.

Gambar 4.1. Persentase Penduduk Perempuan yang Bekerja Menurut Sektor Usaha Tahun 2003-2016



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 4.4 memperlihatkan secara umum bahwa dari 3.998.637 orang penduduk yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan, 48,43 persen diantaranya bekerja di pertanian, perburuan, kehutanan dan perikanan, sektor primer. Lapangan usaha kedua terbesar yang mampu menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi yaitu 18,04 persen dan diikuti oleh sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebanyak 16,46 persen. Secara rinci, data mengenai persentase penduduk yang bekerja menurut

lapangan pekerjaan dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2016

Lapangan Pekerjaan (1)	2015			2016		
	Lk (2)	Pr (3)	Total (2)	Lk (3)	Pr (2)	Total (3)
Sektor Primer						
Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	56,24	52,27	54,74	51,27	44,14	48,43
Pertambangan&Penggalian	2,43	0,13	1,56	2,70	0,34	1,76
Sektor Sekunder						
Industri	4,92	4,35	4,70	5,01	5,93	5,38
Listik. Gas. Air	0,23	0,08	0,17	0,39	-	0,23
Konstruksi	7,10	0,34	4,54	6,90	0,35	4,29
Sektor Tersier						
Perdagangan. Rumah Makan & Jasa Akomodasi	11,96	24,79	16,82	13,52	24,88	18,04
Transportasi. Pergudangan dan Komunikasi	5,65	0,35	3,64	6,25	0,50	3,96
Keuangan. Freal Estate. Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,72	1,43	1,61	1,74	0,99	1,44
Jasa Kemasyarakatan. Sosial dan Perorangan	9,76	16,26	12,22	12,23	22,87	16,46
Jumlah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	N	2.296.950	1.398.916	3.695.866	2.407.674	1.590.963
						3.998.637

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Sakernas tahun 2016 tidak dapat mengeluarkan level kab/kota karena alasan kecukupan sampel sehingga hanya hanya mereview tahun 2015. Kontribusi sektoral penyerapan tenaga kerja hampir sama antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Di mana hampir di seluruh kabupaten daya serap tenaga kerja masih didominasi oleh sektor pertanian, kecuali di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam dan Kota Lubuk Linggau dominasi sektor tersier lebih terlihat. Sebagaimana diketahui, Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan, tentu saja kondisi perekonomiannya lebih maju dibanding kabupaten lainnya. Tampak sektor perekonomian

modern (sektor sekunder dan tersier) telah mendominasi penyerapan tenaga kerja.

Tabel 4.5. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Lapangan Usaha			Total	
	Primer	Sekunder	Tersier	%	N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Ogan Komering Ulu	54,68	5,48	39,84	100,00	155.208
2. Ogan Komering Ilir	67,12	7,88	25,00	100,00	343.665
3. Muara Enim	70,31	5,41	24,29	100,00	282.665
4. Lahat	64,74	4,84	30,42	100,00	197.591
5. Musi Rawas	76,38	6,29	17,33	100,00	193.051
6. Musi Banyuasin	74,88	4,82	20,31	100,00	269.140
7. Banyuasin	69,52	7,86	22,62	100,00	360.305
8. OKU Selatan	80,41	2,04	17,55	100,00	186.238
9. OKU Timur	72,37	7,22	20,42	100,00	321.099
10. Ogan Ilir	53,40	13,41	33,19	100,00	202.337
11. Empat Lawang	75,99	2,59	21,42	100,00	115.421
12. P A L I	83,72	3,36	12,92	100,00	87.253
13. Musi Rawas Utara	73,66	3,59	22,75	100,00	79.422
71. Palembang	5,83	22,06	72,11	100,00	663.315
72. Prabumulih	37,26	12,95	49,79	100,00	82.887
73. Pagaralam	51,46	4,51	44,02	100,00	72.798
74. Lubuklinggau	26,91	13,04	60,05	100,00	83.471
Sumatera Selatan	56,29	9,42	34,29	100,00	3.695.866
Sumatera Selatan (2016)	50,19	9,90	39,90	100,00	3.998.637

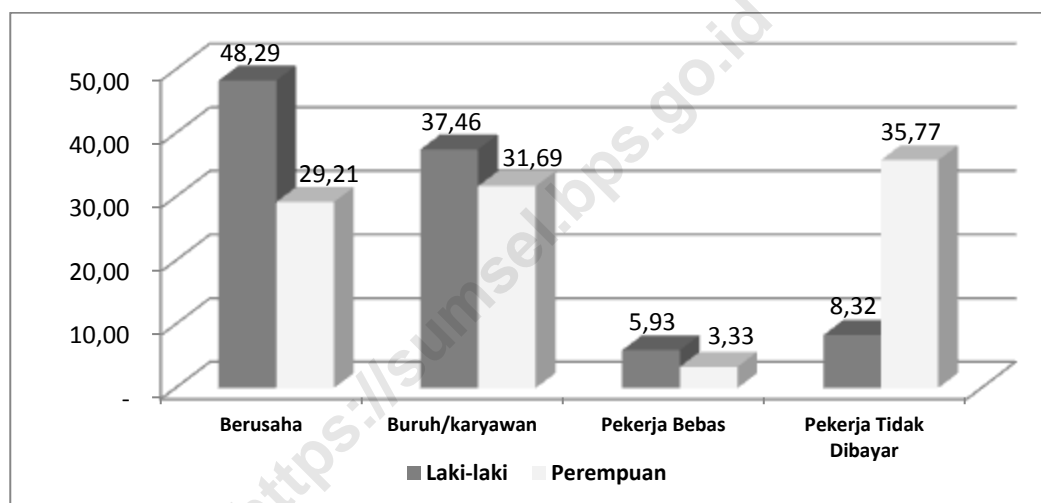
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

4.3. Status Pekerjaan

Perempuan dan laki-laki Sumatera Selatan juga mempunyai struktur status pekerjaan utama yang berbeda. Jika dilihat dari sisi gender, terdapat

perbedaan yang sangat signifikan dimana mayoritas pekerja perempuan pada 2016 adalah mereka yang berstatus sebagai pekerja tak dibayar (35,77%), sementara pekerja laki-laki terdistribusi pada status buruh/karyawan (37,46%), dan berusaha 48,29 % yang terdiri dari berusaha dibantu buruh tetap, tidak tetap/buruh tidak dibayar dan berusaha sendiri. Hal ini menandakan tenaga kerja umumnya masih banyak dalam kegiatan informal yang berarti pula sangat mudah berpindah pekerjaan ke sektor lain di masa yang akan datang.

Gambar 4.2. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2016



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

4.4. Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Selatan pada Tahun 2016 sebesar 4,31 persen, mengalami penurunan sebesar 1,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara absolut, angka pengangguran di Sumatera Selatan pada Tahun 2016 masih relatif tinggi yaitu sebesar 180.157 orang, dimana 45,82 persen diantaranya belum pernah bekerja. Hal ini menunjukkan masih banyaknya pencari kerja yang tidak tertampung oleh lapangan kerja yang ada, sehingga menyebabkan mereka terpaksa

menganggur. Untuk itu, diperlukan penciptaan lapangan kerja yang cukup banyak agar dapat menampung tenaga kerja yang menganggur tersebut. Hal lain yang turut mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran di Sumatera Selatan adalah perkembangan keadaan perekonomian secara global.

Tabel 4.6. Jumlah Penduduk yang Menganggur menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Sumatera Selatan 2015 dan 2016 (orang)

Daerah	2015			2016		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	74.381	42.788	117.169	53.552	33.273	86.825
Pedesaan	69.032	52.720	121.752	57.080	36.252	93.332
Total	143.413	95.508	238.921	110.632	69.525	180.157

Sumber: BPS, diolah dari Sakernas 2015 dan 2016

Tabel 4.7 memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan selain karena pengaruh pertumbuhan alamiah penduduk, kemungkinan juga karena dipengaruhi oleh arus masuk angkatan kerja dari daerah pedesaan atau dari daerah lainnya diluar Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu sebagai konsekuensi dari meningkatnya tingkat pendidikan penduduk, akan berpengaruh juga terhadap tingkat pengangguran di daerah perkotaan karena pencari kerja pertama kali yang merasa memiliki pendidikan yang memadai, baik yang berasal dari daerah perkotaan itu sendiri maupun yang berasal dari daerah pedesaan akan terkonsentrasi mencari pekerjaannya di daerah perkotaan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

Sementara itu kesempatan kerja sektor-sektor produktif di perkotaan yang tersedia tidak mampu menampung para pencari kerja, hal tersebut

berakibat pada tingginya tingkat pengangguran di daerah perkotaan. Berbeda dengan daerah pedesaan yang pada umumnya tingkat pendidikan penduduknya relatif masih rendah sehingga angkatan kerja yang ada tidak mempunyai banyak tuntutan terhadap jenis pekerjaan yang diinginkan dan mau menerima pekerjaan-pekerjaan di sektor informal atau tradisional.

Tabel 4.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Sumatera Selatan Tahun 2015 dan 2016 (%)

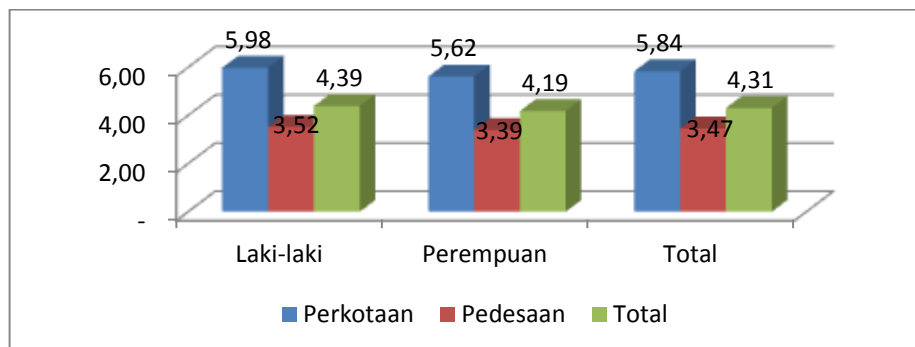
Daerah	2015			2016		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	8,83	8,12	8,56	5,98	5,62	5,84
Pedesaan	4,32	5,45	4,75	3,52	3,39	3,47
Total	5,88	6,39	6,07	4,39	4,19	4,31

Sumber: BPS, diolah dari Sakernas 2015 dan 2016

Secara umum dilihat dari sisi gender, pengangguran laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal ini wajar dikarenakan perempuan secara budaya timur biasanya perempuan tidak dituntut untuk bekerja dibanding laki-laki.

Tingkat pengangguran terbuka perempuan secara umum pada tahun 2016 menurun dibanding tahun sebelumnya, dari sebesar 6,39 persen pada tahun 2015 menjadi 4,19 persen tahun 2016. Penurunan tersebut terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Di daerah perkotaan terjadi penurunan sebesar 2,72 persen sedangkan di daerah pedesaan terjadi penurunan 1,76 persen.

Gambar 4.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Sumatera Selatan Tahun 2016



Sumber : Sakernas 2016

Demikian pula dengan tingkat pengangguran terbuka penduduk laki-laki pada tahun 2016 juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dari sebesar 5,88 persen tahun 2015 menjadi 4,19 persen pada tahun 2016. Penurunan tingkat pengangguran laki-laki tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya tenaga kerja laki-laki di daerah pedesaan.

Sakernas tahun 2016 tidak dapat mengeluarkan level kab/kota karena alasan kecukupan sampel sehingga hanya hanya mereview tahun 2015. Tingkat pengangguran terbuka bervariasi antar kabupaten/kota. Sebagaimana sudah dibahas dalam uraian sebelumnya.

Kabupaten/kota yang masih didominasi daerah pedesaan mempunyai tingkat pengangguran terbuka yang rendah, seperti Kabupaten PALI 0,94 persen dan Kabupaten OKU Selatan 1,83 persen. Sedangkan Kota Lubuklinggau dan Kota Palembang merupakan 2 (dua) kota yang mempunyai tingkat pengangguran terbuka tertinggi yaitu 12,31 persen dan 9,52 persen.

Tabel 4.8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten /Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ogan Komering Ulu	7,18	8,38	7,64
2. Ogan Komering Ilir	6,40	7,71	6,89
3. Muara Enim	6,93	6,31	6,69
4. Lahat	4,04	4,58	4,26
5. Musi Rawas	1,86	2,34	2,04
6. Musi Banyuasin	4,73	7,37	5,61
7. Banyuasin	3,75	8,90	5,56
8. OKU Selatan	1,53	2,30	1,83
9. OKU Timur	4,38	5,30	4,74
10. Ogan Ilir	6,57	3,82	5,43
11. Empat Lawang	4,74	5,88	5,21
12. P A L I	1,50	0,20	0,94
13. Musi Rawas Utara	2,70	3,52	2,99
71. Palembang	10,08	8,64	9,52
72. Prabumulih	7,76	4,12	6,26
73. Pagaralam	3,94	2,96	3,53
74. Lubuklinggau	10,54	16,23	12,31
Sumatera Selatan	5,88	6,39	6,07
Sumatera Selatan (2016)	4,39	4,19	4,31

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

4.5. Pengangguran Terdidik

Permasalahan ketenagakerjaan lainnya yang dihadapi Provinsi Sumatera Selatan adalah tingginya tingkat pengangguran terdidik terutama di daerah perkotaan. Tabel 4.10 memberikan gambaran mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengangguran berdasarkan gender.

Tabel 4.9. Tingkat Pengangguran menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan 2016 (%)

Jenjang Pendidikan	2015			2016		
	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
< SD	3,31	2,27	2,86	1,07	2,96	1,92
SD	2,62	3,06	2,79	2,97	3,09	3,02
SLTP	5,04	5,48	5,18	4,48	2,79	3,88
SLTA	11,28	14,83	12,46	7,85	8,15	7,96
PT	6,22	6,48	6,35	2,88	3,10	2,99
Total	5,88	6,39	6,07	4,39	4,19	4,31

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Data yang ada memperlihatkan bahwa pendidikan yang tinggi belum merupakan jaminan untuk segera mendapatkan pekerjaan, bahkan pendidikan yang tinggi justru seringkali menjadi penghalang bagi seseorang untuk masuk dalam pasar tenaga kerja. Terbukti tingkat pengangguran pada jenjang pendidikan SLTA persentasenya lebih tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.

Tingkat pengangguran terdidik didefinisikan sebagai rasio jumlah pencari kerja berpendidikan SLTA keatas (sebagai kelompok terdidik) terhadap angkatan kerja pada kelompok tersebut. Pada tahun 2016 tingkat pengangguran terdidik tingkat SLTA di Sumatera Selatan menurun, dari sebesar 12,46 persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 7,96 persen pada tahun 2016 atau terjadi penurunan sebesar 4,5 persen. Data tersebut mengindikasikan bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja berpendidikan SLTA keatas di Sumatera Selatan pada Tahun 2016, sebanyak 7 sampai 8 orang diantaranya sedang menganggur. Dapat diduga bahwa mereka yang termasuk dalam kelompok pengangguran terdidik adalah para pencari kerja usia muda atau pencari kerja pertama kali yang baru tamat dari pendidikan sekolah.

Seperti telah disinggung sebelumnya, banyak faktor yang mungkin mempengaruhi demikian tingginya tingkat pengangguran terdidik. Kalangan ekonom cenderung menyebut kekakuan lapangan kerja sebagai penyebab tidak terserapnya tenaga kerja terdidik. Sebagai ilustrasi, pendidikan yang relatif tinggi menyebabkan para pencari kerja umumnya merasa enggan untuk bekerja di kegiatan ekonomi informal. Pilihan utama biasanya adalah bekerja di sektor-sektor formal atau sektor-sektor ekonomi produktif. Padahal lapangan kerja di sektor-sektor tersebut ketersediaanya sangat terbatas, sehingga mereka terpaksa menganggur. Ilustrasi di atas mengartikan bahwa tingginya angka pengangguran terdidik lebih disebabkan oleh faktor eksternal pendidikan, misalnya budaya priyayi atau pola pikir masyarakat yang menganggap pekerjaan-pekerjaan formal itu lebih *bonafit* dibandingkan pekerjaan informal. Selain itu, faktor internal dari proses pendidikan turut juga mempengaruhi masih tingginya angka pengangguran terdidik sebagai paradoks dunia.

4.5. Setengah Pengangguran

Dimensi lain dari permasalahan ketenagakerjaan adalah pemanfaatan tenaga kerja dalam hal ini biasanya diistilahkan dengan setengah pengangguran. Mereka yang dikategorikan sebagai setengah pengangguran yaitu mereka yang sudah bekerja tetapi jam kerjanya kurang dari 35 jam selama seminggu. Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan tenaga kerja yang rendah sekaligus juga menggambarkan rendahnya produktifitas pekerja. Karena meskipun mereka bekerja tetapi belum menggunakan seluruh kapasitas sumber daya yang ada seperti tingkat pendidikan, skill dan keterampilan yang dimiliki atau tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang diharapkan sehingga mereka masih berusaha mendapatkan pekerjaan lain.

Di Provinsi Sumatera Selatan, seperti yang ditunjukkan oleh data pada Tabel 4.11, tahun 2016 tingkat setengah pengangguran angkanya cukup tinggi

yaitu 31,91 persen. Artinya dari setiap 100 angkatan kerja yang sudah bekerja, sebanyak 31 sampai 32 orang mempunyai jam kerja yang relatif kecil (kurang dari 35 jam per minggu). Secara eksplisit hal ini menandakan bahwa produktivitas pekerja di Sumatera Selatan cenderung masih rendah.

Dari fakta di atas, tampak jelas bahwa problem pengangguran di Sumatera Selatan masih cukup berat. Tingkat pengangguran terbuka meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,31 persen, namun bila ditambah dengan tingkat setengah pengangguran yang mencapai 31,91 persen, maka Sumatera Selatan memiliki angka pengangguran yang cukup besar, mencapai hampir separuh dari angkatan kerja, yaitu 36,22 persen.

Tabel 4.10. Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin. Sumatera Selatan Tahun 2016

Daerah	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	15,85	28,36	20,83
Pedesaan	33,87	44,34	38,03
Perkotaan + Pedesaan	27,47	38,64	31,91

Sumber: BPS, diolah dari Sakernas 2016

Dengan belum adanya tunjangan bagi pengangguran di negara kita, maka para pencari kerja tidak mungkin terus bertahan sebagai penganggur sementara mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan mereka terpaksa menerima atau melakukan pekerjaan apa saja meskipun tidak sesuai dengan pendidikan atau skill yang dimiliki. Tentunya hal ini mereka lakukan dengan satu harapan suatu saat kelak akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Hal inilah yang diduga menjadi faktor penyebab masih tingginya tingkat setengah pengangguran di Sumatera Selatan.

Dilihat menurut perbedaan daerah tempat tinggal seperti yang ditunjukkan oleh data dalam Tabel 4.10, tingkat setengah pengangguran di pedesaan jauh lebih tinggi daripada tingkat setengah pengangguran di perkotaan, padahal TPT di daerah pedesaan justru jauh lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan. Dari ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa penduduk di pedesaan memang lebih banyak yang bekerja dibandingkan perkotaan, akan tetapi banyak yang bekerja pada sektor-sektor informal dan bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

Tabel 4.11. Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ogan Komering Ulu	36,94	45,21	40,09
2. Ogan Komering Ilir	33,77	56,35	42,10
3. Muara Enim	38,87	48,06	42,39
4. Lahat	32,21	48,60	38,80
5. Musi Rawas	49,81	59,41	53,47
6. Musi Banyuasin	41,11	47,45	43,22
7. Banyuasin	32,89	49,69	38,80
8. OKU Selatan	24,24	52,97	35,39
9. OKU Timur	32,57	57,42	42,09
10. Ogan Ilir	19,20	34,19	25,41
11. Empat Lawang	40,89	60,05	48,85
12. P A L I	48,34	61,69	54,12
13. Musi Rawas Utara	59,60	70,83	63,56
71. Palembang	10,55	25,32	16,28
72. Prabumulih	23,82	36,68	29,12
73. Pagaram	13,13	28,18	19,40
74. Lubuklinggau	15,72	29,70	20,08
Sumatera Selatan	29,93	45,43	35,82

Sumber: BPS, diolah dari Sakernas 2015

Pada Tabel 4.11. dapat dilihat sebaran tingkat setengah pengangguran menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015. Sakernas tahun 2016 tidak dapat mengeluarkan level kab/kota karena alasan kecukupan sampel sehingga hanya mereview tahun 2015.

Bila dilihat menurut kabupaten/kota, hampir diseluruh kabupaten/kota di seluruh Sumatera Selatan mempunyai tingkat setengah pengangguran yang cenderung tinggi. Bahkan bila diamati lebih lanjut, kabupaten-kabupaten dengan dominasi daerah pedesaan seperti Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten PALI, dan Kabupaten Musi Rawas memiliki tingkat setengah pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Dari sini dapat di duga bahwa penduduk yang bekerja pada kabupaten tersebut sebagian besar dari mereka termasuk dalam kelompok setengah pengangguran adalah para pekerja keluarga di sektor pertanian.

Secara ringkas, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil pengolahan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 4.12. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Menurut Jenis Kelamin

Keadaan Ketenagakerjaan Sumatera Selatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	85,13	57,67	71,59
2 Lapangan Pekerjaan			
Sektor Primer	53,97	44,48	50,19
Sektor Sekunder	12,30	6,28	9,90
Sektor Tersier	33,74	49,24	39,90
3 Status Pekerjaan			
Berusaha	48,29	29,21	48,29
Buruh / Karyawan	37,46	31,69	37,46
Pekerja Bebas	5,93	3,33	5,93
Pekerja Tak Dibayar	8,32	35,77	8,32
4 Angka Pengangguran	4,39	4,19	4,31

KESEHATAN

Kesehatan merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tingkat kesehatan juga merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan.

Oleh karena itu masalah kesehatan sangat penting dikemukakan sehubungan dengan statistik menurut jenis kelamin.

Di lihat dari sisi perempuan, kondisi kesehatan dan status gizi ibu merupakan elemen pokok dari mata rantai terciptanya SDM yang berkualitas. Perempuan secara kodrati memiliki fungsi-fungsi reproduksi yang berbeda dengan pria yaitu haid, hamil, melahirkan, dan menyusui yang merupakan suatu proses yang sangat menentukan derajat kesehatan dirinya dan anak yang dikandungnya. Untuk itu seharusnya perempuan memiliki hak menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.

Beberapa indikator kesehatan yang penting antara lain angka kematian bayi, angka harapan hidup, angka kesakitan (*morbidity rate*) dan penolong persalinan.

5.1. Angka Kematian Bayi

Peningkatan kesehatan perempuan merupakan bagian dan komitmen Pembangunan Milenium (MDG's). Salah satu tujuan pembangunan yang terkait langsung dengan kesehatan perempuan yaitu meningkatkan kesehatan ibu serta menurunkan angka kematian anak. Kualitas kesehatan seorang ibu yang rendah pada gilirannya akan menghasilkan anak yang tumbuh kembangnya tidak sempurna. Pada kasus yang ekstrim, tingkat kesehatan ibu yang rendah dapat menyebabkan kematian ibu dan anaknya.

Definisi kematian menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Khusus untuk kematian bayi, dibedakan menjadi kematian yang terjadi sejak dalam kandungan dan kematian di luar kandungan. Bayi yang lahir dalam keadaan meninggal disebut *Fetal Death*, sementara bayi lahir hidup yang meninggal sebelum berumur satu tahun disebut *Infant Death*.

Angka Kematian Bayi (AKB) didefinisikan sebagai banyaknya kematian bayi usia di bawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. AKB merupakan indikator penting untuk mencerminkan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan di mana tempat orangtua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orangtua si bayi. Penurunan AKB merupakan salah satu indikator penting dari keberhasilan pembangunan kesehatan. Hal ini disebabkan penurunan angka kematian bayi berkaitan erat dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat, penyediaan fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dan yang paling penting adalah peningkatan pendapatan serta kondisi kesejahteraan penduduk secara umum.

AKB Sumatera Selatan dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Jika dilihat dari tahun 1990, AKB masih sangat tinggi yaitu di angka 71 yang artinya terdapat 71 bayi yang meninggal dalam 1.000 bayi yang lahir hidup. Apabila dilihat dari jenis kelamin maka AKB laki-laki tercatat sebesar 79 dan AKB perempuan sebesar 64, artinya setiap 1000 bayi yang lahir hidup, 79 orang bayi laki-laki di antaranya meninggal atau tidak dapat mencapai umur 1 tahun, demikian pula untuk bayi perempuan, dari 1000 bayi yang lahir hidup 64 orang bayi perempuan meninggal sebelum umur 1 tahun.

Pada tahun 1995 AKB Sumatera Selatan turun menjadi 54, sementara jika dilihat menurut jenis kelamin, AKB laki-laki sebesar 61 dan AKB perempuan sebesar 48. Terjadi penurunan AKB pada tahun 2003 menjadi 45,76 untuk laki-

laki dan 34,33 untuk perempuan. Penurunan ini terjadi seiring dengan adanya peningkatan fasilitas kesehatan. Begitu juga pada tahun 2004 AKB laki-laki sebesar 44,59 mengalami penurunan menjadi 43 pada tahun 2007. Tetapi AKB perempuan justru meningkat dari 33,45 pada tahun 2004 menjadi 35 pada tahun 2007. Berdasarkan beberapa data diatas, dapat dilihat bahwa angka kematian bayi perempuan lebih kecil dari angka kematian bayi laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa bayi laki-laki secara fisik lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan bayi perempuan.

Sementara itu pada tahun 2010, AKB Sumatera Selatan menurun menjadi 25 kematian per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2012 AKB Provinsi Sumatera Selatan meningkat kembali menjadi 29 kematian per 1000 kelahiran hidup.

5.2. Angka Keluhan Sakit

Angka keluhan sakit merupakan angka yang menunjukkan banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Berdasarkan Tabel 5.1 angka keluhan kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2015 cenderung mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun 2016 terjadi penurunan angka keluhan sakit, yaitu pada tahun 2015 angka keluhan sakit sebesar 29,41 mengalami penurunan menjadi 26,63 di tahun 2016. Angka keluhan masyarakat Sumatera Selatan 2016 sebesar 26,63 artinya setiap 100 orang penduduk lebih kurang 27 orang mempunyai keluhan kesehatan. Angka keluhan memperlihatkan relatif tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki sebesar 25,91 sedangkan perempuan sebesar 27,37 yang artinya dari setiap 100 penduduk laki-laki 26 orang diantaranya mempunyai keluhan kesehatan begitu juga dengan penduduk perempuan dari 100 diantaranya 27 orang mengalami keluhan kesehatan.

5.3. Angka Kesakitan

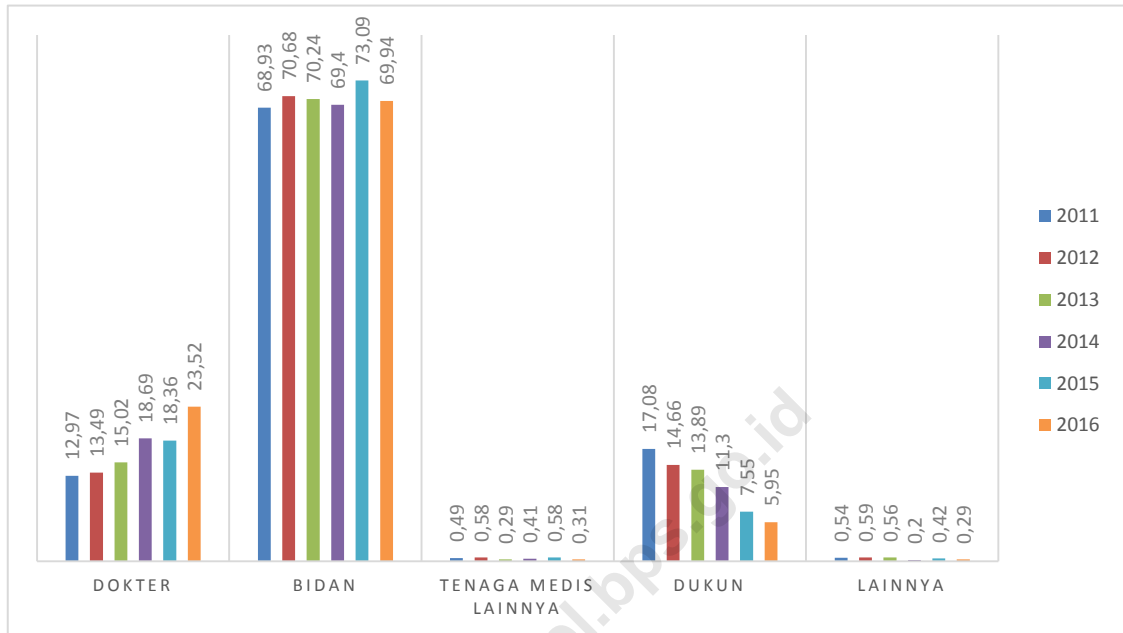
Angka kesakitan (*morbidity rate*) dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kesehatan penduduk. Angka ini menunjukkan tingkat kemungkinan menderita penyakit per 100 penduduk.

Berdasarkan Tabel 5.1 angka kesakitan masyarakat di Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 angka kesakitan sebesar 13,50, mengalami penurunan menjadi 12,25 di tahun 2016. Angka kesakitan masyarakat Sumatera Selatan tahun 2016 sebesar 12,25 artinya setiap 100 orang penduduk lebih kurang 12 orang menderita penyakit. Angka kesakitan dilihat dari jenis kelamin memperlihatkan relatif tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dimana angka kesakitan laki-laki sebesar 12,30 sedangkan perempuan sebesar 12,20 yang artinya dari setiap 100 penduduk laki-laki dan perempuan kurang lebih 12 orang menderita penyakit.

5.4. Penolong Persalinan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan yang tidak kalah pentingnya adalah penolong persalinan bayi. Hal ini berkaitan dengan upaya penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu saat melahirkan. Data mengenai penolong persalinan menjadi sangat penting karena penolong kelahiran sangat mempengaruhi kesehatan bayi yang dilahirkan. Persalinan yang ditolong oleh dokter dan bidan dipandang lebih baik dari segi kesehatan dibandingkan persalinan yang ditolong oleh dukun atau tenaga nonmedis lainnya.

Grafik 5.1 Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan di Provinsi Sumatera Selatan 2011-2016



Sumber : Susenas 2011-2016

Pada tahun 2016 di Sumatera Selatan penolong persalinan yang paling banyak dimanfaatkan adalah bidan yaitu sebesar 69,94 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 73,09 persen. Hal ini diikuti dengan meningkatnya angka penolong persalinan oleh dokter dimana pada tahun 2015 penolong persalinan oleh dokter sebesar 18,36 persen menjadi 23,52 persen pada tahun 2016. Sedangkan persalinan yang ditolong oleh dukun juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 sebesar 7,55 persen menjadi 5,95 persen pada tahun 2016, persalinan yang ditolong oleh dukun terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu 17,08 persen di tahun 2011 menjadi 14,66 persen di tahun 2012, di tahun 2013 turun kembali menjadi 13,89 persen dan di tahun 2014 turun menjadi 11,30. Penolong persalinan oleh tenaga medis lainnya di tahun 2016 sebesar 0,31 persen. Sementara penolong persalinan oleh selain bidan, dukun dan dokter mencapai 0,29 persen.

Tabel. 5.1. Keadaan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1990-2016 Menurut Jenis Kelamin

Keadaan Kesehatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Angka Kematian Bayi			
- 1990	79	64	71
- 1995	61	48	54
- 1997	-	-	53
- 2000			53
- 2003	45,76	34,33	-
- 2004	44,59	33,45	-
- 2005	-	-	30
- 2007	43	35	42
- 2010	-	-	25
- 2012	-	-	29
2. Angka Keluhan Kesehatan			
- 2009	32,19	32,59	32,38
- 2010	29,79	29,56	29,68
- 2011	26,81	27,59	27,19
- 2012	19,07	25,78	24,88
- 2013	23,98	24,34	24,16
- 2014	26,11	27,42	26,75
- 2015			29,41
- 2016	25,91	27,37	26,63
3. Angka Kesakitan			
- 2013	10,12	9,56	9,84
- 2014	10,58	10,36	10,47
- 2015	13,33	13,68	13,50
- 2016	12,30	12,20	12,25

Sumber : BPS; SP 1990, 2000, 2010, Supas 1995 dan 2005, SDKI 1997, 2002-2003, 2007, 2012, Susenas 2013, 2014, 2015, 2016

FERTILITAS DAN KB

Fertilitas dan Keluarga Berencana merupakan masalah yang tidak bisa dipisahkan manakala kita berbicara mengenai peningkatan peran perempuan. Peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sosial dan ekonomi akan berpengaruh terhadap pola perilaku perempuan dalam berumah tangga termasuk pola fertilitas dan pemakaian alat kontrasepsi.

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan penurunan tingkat fertilitas dari wanita usia subur dari waktu ke waktu. Usia 15-49 tahun merupakan usia subur bagi seorang wanita karena pada rentang usia tersebut kemungkinan wanita untuk melahirkan anak cukup besar. *Total Fertility Rate* (TFR) menggambarkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita pada akhir masa reproduksinya jika ia mengikuti pola fertilitas yang berlaku. Pada Tabel 6.1 dari data SDKI 2012 dapat dilihat bahwa rata-rata wanita di Sumatera Selatan akan mempunyai 2,8 anak selama hidupnya. Sementara itu dari tabel tersebut juga didapat informasi bahwa 4,6 persen wanita berusia 15-49 tahun sedang hamil.

Program Keluarga Berencana (KB) dan penundaan usia perkawinan pertama pada wanita merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat fertilitas di Sumatera Selatan karena berdampak memperpendek masa reproduksi mereka. Wanita yang kawin pada usia sangat muda mempunyai resiko cukup besar pada saat mengandung dan melahirkan yang berdampak terhadap keselamatan ibu maupun anak.

Beberapa indikator fertilitas di Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1. Beberapa Indikator Fertilitas di Sumatera Selatan (beberapa tahun)

Tahun	TFR	Persentase Wanita Hamil Usia 15 - 49 Tahun	Rata-rata ALH Wanita Usia 40 - 49 Tahun	Median Umur Persalinan Pertama Wanita Usia 25 - 49 Tahun
1	2	3	4	5
1991	3,43	-	5,26	-
1994	2,87	4,12	5,20	20,7
1997	2,64	3,70	5,10	21,0
2002/ 2003	2,30	2,50	4,40	20,6
2007	2,60	2,10	4,20	21,6
2012	2,8	4,6	3,3	-

Sumber : SDKI (1991, 1994, 1997, 2002/2003, 2007, 2012)

6.1. Umur Perkawinan Pertama

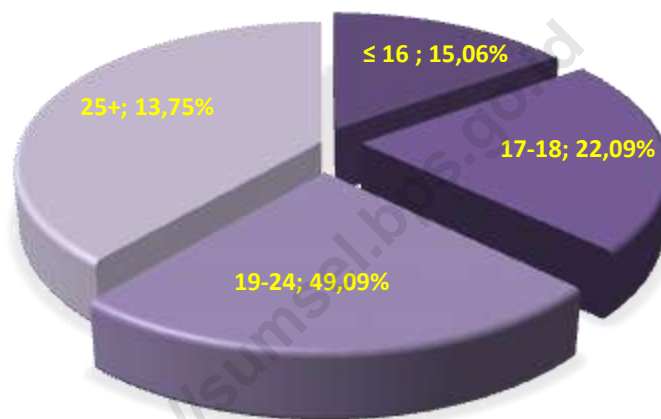
Umur perkawinan pertama perempuan berpengaruh terhadap tingkat fertilitas perempuan. Semakin muda umur perkawinan perempuan pertama berarti semakin panjang masa reproduksi bagi perempuan. Dengan demikian kemungkinan mempunyai anak semakin besar pula.

Berdasarkan data Susenas 2016 (Tabel 6.2) menunjukkan bahwa saat ini sekitar 15,06 persen perempuan pernah kawin usia 10 tahun ke atas menikah pertama kali pada usia kurang dari 16 tahun, angka ini menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2015 dimana banyaknya perempuan yang usia perkawinan pertamanya kurang dari 16 tahun adalah sebesar 8,87 persen, sementara 22,09 persen wanita

menikah pertama kali pada usia 17-18 tahun. Mayoritas perempuan pernah kawin usia 10 tahun ke atas melakukan perkawinan pertama pada usia 19-24 tahun yaitu sebesar 49,09 persen. Sedangkan yang melakukan perkawinan pertama pada usia di atas 25 tahun sebesar 13,75 persen.

Berikut dapat dilihat gambaran mengenai persentase wanita menurut umur perkawinan pertama di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016.

Gambar. 6.1 Persentase Wanita Menurut Perkawinan Pertama di Sumatera Selatan, Tahun 2016



Sumber : Susenas 2016

6.2. Partisipasi KB

Partisipasi KB umumnya diukur dengan besarnya persentase perempuan berstatus kawin usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan KB (*current user*) dan yang pernah menggunakan KB (*ever user*). Berdasarkan data Susenas 2016 angka *current user* mencapai 65,05 persen sedangkan angka *ever user* sebesar 8,77 persen. Angka *current user* pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu dari 68,06 persen di tahun 2015 menjadi 65,05 persen di tahun 2016. Begitu juga dengan angka *ever user* menurun dibanding tahun

sebelumnya yaitu dari 10,44 persen di tahun 2015 menjadi 8,77 persen di tahun 2016.

Pada tahun 2016 jenis alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntikan 64,27 persen kemudian disusul oleh alat kontrasepsi pil sebesar 17,62 persen. Begitu juga di tahun sebelumnya jenis alat kontrasepsi suntikan dan pil yang paling banyak digunakan. Banyaknya penggunaan kedua alat kontrasepsi ini karena selain relatif murah juga mempunyai resiko yang lebih kecil.

Pada tahun 2016 alat kontrasepsi yang tidak pernah digunakan adalah jenis intravag/tissue, sedangkan alat kontrasepsi yang paling jarang digunakan adalah vasektomi dimana pemakainya hanya sebanyak 0,10 persen. Sementara itu penggunaan jenis kontrasepsi kondom dan tubektomi masing-masing hanya sebesar 1,31 persen dan 4,26 persen. Dari beberapa data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rendahnya persentase pemakaian kondom dan vasektomi ini juga menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam KB masih relatif rendah.

Tabel. 6.2. Keadaan Fertilitas dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2016

Rincian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 10 Tahun Keatas Menurut Usia Perkawinan Pertama				
≤ 16	18,28	19,11	8,87	15,06
17-18	24,26	24,01	15,76	22,09
19-24	45,85	44,78	65,56	49,09
25+	11,61	12,11	9,80	13,75
2. Persentase Perempuan Berstatus Kawin Usia 15-49 Yang Menggunakan Alat Kontrasepsi				
- Pernah Menggunakan Alat Kontrasepsi	19,90	18,43	10,44	8,77
- Sedang Menggunakan Alat Kontrasepsi	67,85	66,47	68,06	65,05
3. Jenis Kontrasepsi Yang Sedang Digunakan				
Tubektomi	1,45	1,55	1,32	4,26
Vasektomi	0,39	0,24	0,13	0,10
IUD	1,64	2,14	2,08	3,80
Suntikan	72,23	71,61	69,84	64,27
Susuk	8,43	8,83	10,47	6,45
Pil	15,16	13,32	14,07	17,62
Kondom	0,52	0,74	0,58	1,31
Intravag/Tissue	0,02	0,05	0,02	0,00
Cara Tradisional	1,18	1,52	1,49	1,90

Sumber: Susenas 2013, 2014, 2015 dan 2016

<https://sumsel.bps.go.id>

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa bidang, perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Komposisi penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 menurut

jenis kelamin nampak di sini secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Dalam bidang pendidikan, tingkat pendidikan perempuan secara umum masih lebih rendah dibandingkan laki-laki walaupun partisipasi sekolah penduduk perempuan meningkat dari tahun ke tahun. Dalam bidang ketenagakerjaan antara lain ditunjukkan oleh tingkat partisipasi perempuan yang lebih rendah dalam angkatan kerja. Dalam bidang kesehatan, khususnya partisipasi dalam KB, partisipasi laki-laki dalam KB yang masih relatif rendah.

Mengingat perempuan merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan, maka perhatian yang lebih besar lagi perlu diberikan untuk mendorong peran perempuan dalam berbagai aspek pembangunan.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sumsel.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Jl. Kapten Anwar Sastro 1694/1131 Palembang 30129
Telp. : (0711) 351665, 353174

ISSN : 2503-409X



9 772503 409000